

Evaluasi Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur; Studi Di Desa Ogolali Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli

Abdul Wahid Safar B^{1*}, Eka De Patmonsela Liow², Abd. Kahar³, Hasriani⁴

¹²³⁴ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Madako Tolitoli
Jln. Madako No. 01, Kelurahan Tambun, Kabupaten Tolitoli, Indonesia

Corresponding author:

[*abdul.wahid.safar@gmail.com](mailto:abdul.wahid.safar@gmail.com)



This is an open access article under the
CC BY license

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengaruh pemekaran terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Ogolali dengan menggunakan kerangka evaluatif Dunn (Efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif; data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam (11 informan *purposive*), dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil menunjukkan bahwa pemekaran berhasil mewujudkan sejumlah output infrastruktur seperti fasilitas pendidikan, irigasi, dengan capaian teknis sekitar 80%; namun pencapaian outcome yang berdampak nyata terhadap kesejahteraan (terutama perbaikan jalan desa) belum konsisten. Faktor penghambat meliputi keterbatasan fiskal, kapasitas teknis lokal, koordinasi antar-institusi, dan mekanisme partisipasi masyarakat yang belum optimal. Secara umum, pemekaran memperpendek jalur birokrasi dan meningkatkan potensi alokasi sumber daya, tetapi efektivitas dan kecukupan hasil masih perlu penguatan melalui prioritas anggaran untuk infrastruktur kritis, penguatan tata kelola dan transparansi dana, serta mekanisme monitoring partisipatif. Keterbatasan penelitian: studi kasus tunggal dan desain cross-sectional yang membatasi generalisasi.

Kata Kunci : Evaluasi, Pemekaran Desa, Infrastruktur, Desa Oogili

ABSTRACT

This study aims to evaluate the impact of village division (pemekaran) on infrastructure development in Ogolali Village using Dunn's evaluative framework (effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness). A descriptive qualitative approach was employed; data were collected through observation, in-depth interviews with 11 purposively selected informants, and document review, and were then analyzed through data reduction, presentation, and verification. The findings indicate that the division produced several infrastructure outputs such as educational facilities and irrigation with approximately 80% technical completion; however, achievement of outcomes that produce tangible welfare effects (particularly improvements to village roads) remains inconsistent. Inhibiting factors include fiscal constraints, limited local technical capacity, gaps in inter-agency coordination, and suboptimal mechanisms for community participation. Overall, the division shortened bureaucratic channels and increased the potential for targeted resource allocation, but the effectiveness and adequacy of results still require strengthening through budget prioritization for critical infrastructure, strengthened governance and financial transparency, and participatory monitoring mechanisms. Study limitations: a single case study and a cross-sectional design that limit generalizability.

Keywords: Evaluation, Village expansion, Infrastructure, Oogili Village

PENDAHULUAN

Pemekaran desa merupakan strategi reformasi administrasi fundamental di Indonesia, yang melibatkan pemisahan desa-desa yang ada menjadi dua atau lebih unit administrasi baru. Proses ini biasanya dilakukan untuk meningkatkan penyediaan layanan publik, meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah, dan mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan (Faoziyah & Salim, 2020). Landasan teoretis pemekaran desa bertumpu pada prinsip-prinsip efisiensi administrasi dan kedekatan pemerintahan dengan warga negara, sejalan dengan amanat konstitusi untuk memajukan kesejahteraan. Proses pemekaran meliputi penyesuaian aspek sosial, ekonomi, budaya, dan hukum agar desa baru dapat mandiri dan memenuhi standar pelayanan publik yang optimal (Fachri et al., 2025). Hal ini juga mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (Fachri et al., 2025). Ini juga mendorong peningkatan kualitas hidup individu melalui peningkatan akses ke sumber daya pendidikan, perawatan kesehatan, dan ekonomi. Dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata (Sapara & Eprilianto, 2024). Namun, implementasi pemekaran menghadapi berbagai hambatan termasuk keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya partisipasi masyarakat, dan sarana prasarana yang belum memadai (Sapara & Eprilianto, 2024). Selain itu, motivasi politik seringkali mendominasi proses pemekaran dibandingkan substansi pembangunan, yang dapat mengakibatkan masyarakat tidak sejahtera dan perkembangan ekonomi wilayah terhambat (Hasyim et al., 2010).

Desa Ogolali merupakan salah satu Desa hasil pemekaran dari Desa Banagan sebagai desa induknya, Desa Ogolali Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli di mekarkan pada tahun 2012, sebelum Desa Ogolali menjadi Desa pemekaran, Desa tersebut sebelumnya adalah salah satu dusun dari Desa Banagan dengan nama dusun yaitu Dusun Lembaharapan. Sebelum adanya pemekaran infrastruktur pendukung yang tersedia hanya Sekolah Dasar (SD). Setelah dilakukan pemekaran Desa Ogolali telah memiliki infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan prasarana pendukung lainnya. Meskipun pemekaran Desa Ogolali telah menghasilkan beberapa dampak positif, akan tetapi pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun selama ini belum memfasilitasi secara keseluruhan kebutuhan masyarakat. Salah satu infrastruktur penting yang menjadi kebutuhan utama masyarakat adalah tersedianya jalan desa. Penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur jalan yang baik berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi di desa-desa (Yoga et al., 2024). Kondisi yang terjadi di Desa Ogolali selaras apa yang diungkapkan oleh (Haile, 2020) mengatakan Infrastruktur yang kurang memadai berdampak langsung pada produktivitas masyarakat. Ketika jalan desa dibangun dan diperbaiki, ini tidak hanya meningkatkan transportasi barang dan jasa, tetapi juga meningkatkan mobilitas masyarakat (Yoga et al., 2024; (Windani & Sukmawati, 2023). Kebutuhan lain berkembangnya sebuah desa adalah tersedianya fasilitas olahraga selain jalan. Kondisi infrastruktur olahraga yang belum tersedia di desa Ogolali menjadi tantangan dan harapan bagi masyarakat. Pengembangan infrastruktur olahraga, tidak hanya meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga tetapi juga memperkuat hubungan sosial antar warga dan mendukung pembangunan infrastruktur desa (Ar-rasyid et al., 2025). Fasilitas yang memadai diperlukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam olahraga rekreasi (Bajuri et al., 2018). Selain infrastruktur belum menjangkau keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih terbatas karena keterbatasan sumber daya manusia, hal tersebut menjadi permasalahan yang terjadi di Desa Ogolali. Partisipasi ini penting agar infrastruktur yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Sutrisno et al., 2024).

Atas permasalahan tersebut menarik untuk diteliti, karena harapan dari pemekaran dari desa untuk menciptakan administrasi desa yang lebih dekat dengan didukung infrastruktur penunjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemekaran desa terhadap pembangunan infrastruktur. Mengkaji efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsibilitas, mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan infrastruktur pasca-pemisahan, mensintesis pelajaran yang dipetik di Desa Ogolali, memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk meningkatkan hasil pemekaran desa. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pemekaran Desa sebagai salah satu strategi pembangunan daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam fenomena sosial yang terjadi dalam konteks alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama pengumpulan data (Sugiyono, 2013; Creswell 2014). Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti memaparkan kondisi faktual dan karakteristik fenomena terkait evaluasi pemekaran desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Ogolali. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi

observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Sebanyak 11 informan dipilih melalui teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang Republik Indonesia, yang ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, secara jelas memposisikan pembangunan desa sebagai mekanisme penting yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan dan kualitas keberadaan manusia secara keseluruhan, sekaligus berfungsi sebagai kendaraan pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan mendasar, peningkatan fasilitas dan infrastruktur desa, kapasitas ekonomi lokal, dan pengelolaan sumber daya alam dan pertimbangan lingkungan yang berkelanjutan (UU No. 6/2014, Pasal 78). Untuk memeriksa konsekuensi divestasi terhadap kemajuan infrastruktur di Desa Ogolali, penelitian ini menggunakan kerangka evaluatif yang diartikulasikan oleh Dunn, (2003) dalam ranah analisis kebijakan, menegaskan bahwa evaluasi berfungsi sebagai instrumen analitik holistik untuk penilaian kemandirian kebijakan publik. Menggarisbawahi pentingnya memanfaatkan seperangkat kriteria evaluatif pelengkap yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, daya tanggap, dan kesesuaian/akurasi sebagai metrik fundamental untuk menentukan sejauh mana tujuan kebijakan telah direalisasikan dan apakah alokasi sumber daya dan mekanisme implementasi telah dipilih dengan bijaksana. Evaluasi sangat penting untuk penilaian kebijakan secara holistik (Walker et al., 2022)

Berdasarkan konstruksi teoritis, penekanan evaluatif untuk memastikan sejauh mana pembangunan Desa Ogolali telah 1; meningkatkan pemenuhan ketentuan infrastruktur yang berkaitan dengan kebutuhan fundamental masyarakat (efektivitas), 2; menggunakan sumber daya dengan bijaksana sambil menghindari pengenaan beban administratif yang berlebihan (efisiensi), 3; memastikan alokasi yang memadai untuk upaya pengembangan dan pemeliharaan (kecukupan), 4; difasilitasi distribusi manfaat yang adil di berbagai wilayah dan strata sosial (pemerataan), 5; menangani aspirasi dan persyaratan masyarakat dengan cara yang cepat (responsivitas), serta 5; melaksanakan program sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan dan norma lokal (akurasi/akurasi). Kerangka kerja ini memfasilitasi analisis yang melampaui deskripsi belaka tentang “apa” yang telah dibangun, meluas ke penyelidikan evaluatif tentang “mengapa” dan “bagaimana” hasil tersebut direalisasikan (atau tidak direalisasikan), sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan operasional dan berbasis bukti.

Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan cara yang tepat dan efektif. Menurut Jones, (1991) efektivitas berkenaan dengan sejauh mana suatu alternatif dapat mencapai hasil yang diharapkan atau tujuan dari tindakan yang diambil. Definisi ini diperkuat Dunn, (2003) oleh dalam konteks evaluasi kebijakan, yang secara spesifik menyatakan bahwa Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Dalam konteks Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ogolali, efektivitas dapat diukur sejauh mana proses pemekaran berhasil meningkatkan kualitas infrastruktur dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data dihimpun melalui wawancara mendalam dengan informan menunjukkan bahwa pemekaran Desa Ogolali telah mendorong realisasi sejumlah infrastruktur dasar dan perubahan layanan publik yang dirasakan oleh masyarakat, namun pencapaian tujuan akhir pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya tercapai. Informan menyatakan tingkat kemajuan yang relatif tinggi (sekitar 80%) ditunjukkan oleh hadirnya fasilitas seperti TK, aliran listrik, dan perbaikan layanan administrasi desa, tetapi perbaikan aksesibilitas melalui pengaspalan dan perbaikan jalan desa tetap menjadi masalah utama yang belum terealisasi meskipun rutin diusulkan, sehingga menghambat manfaat ekonomi dan mobilitas yang lebih luas. Jika merujuk pada konsep efektivitas yang menekankan pencapaian outcome akhir. Kondisi ini menggambarkan perbedaan antara efektivitas pada level output (proyek fisik yang terealisasi) dan efektivitas pada level outcome (perbaikan akses yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat), dimana Desa Ogolali saat ini lebih kuat pada capaian output namun belum konsisten pada capaian outcome. Temuan ini menunjukkan pentingnya perhatian lebih pada outcome daripada sekadar output (Nafisah & Kholifah R, 2023). Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur dibutuhkan prioritas anggaran untuk infrastruktur (khususnya jalan), penguatan mekanisme tindak lanjut dan koordinasi antar-instansi terkait, serta penerapan monitoring partisipatif yang melibatkan masyarakat untuk memastikan usulan rutin mendapat respons nyata; langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjembatani gap antara pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Desa Ogolali.

Efisiensi

Efisiensi menunjukkan upaya yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu berfungsi sebagai kerangka analisis kritis untuk menilai kinerja inisiatif infrastruktur pasca

pembangunan di Desa Ogolali. Pandangan Dunn, (2003) yang mendefinisikan efisiensi sebagai hubungan antara masukan (inputs) dengan keluaran (outputs). Upaya peningkatan pembangunan dilaksanakan melalui alokasi dana desa, pemerintah desa secara strategis mengalokasikan anggaran untuk prioritas yang dianggap penting (misalnya, kantong produksi) dan secara aktif meminta kontribusi dari penduduk, baik di bentuk nyata dan tidak berwujud. Informan utama menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penting. Menggarisbawahi pentingnya mendasar keterlibatan masyarakat dalam efisiensi pembangunan infrastruktur pedesaan. Meskipun demikian, hasil empiris juga mengungkapkan kendala tertentu: inisiatif pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan karena keterbatasan fiskal. Mengatasi tantangan ini memerlukan perencanaan strategis dan peningkatan partisipasi masyarakat. Mengacu pada kerangka konseptual Jones, (1991) yang menyatakan bahwa efisiensi secara intrinsik terkait dengan rasionalitas ekonomi dalam pencapaian hasil. Kondisi di Desa Ogolali menunjukkan bahwa meskipun ada tingkat efisiensi pada tahap prosedural, terutama melalui upaya perencanaan sistematis dan mobilisasi partisipatif efisiensi absolut, sebagaimana dimanifestasikan dalam realisasi hasil optimal, tetap menjadi area yang membutuhkan peningkatan lebih lanjut. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi, sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang terstruktur (misalnya, mekanisme kontribusi dan akuisisi lahan yang terdefinisi dengan baik), meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan menambah kompetensi teknis dan koordinasi di antara para pemangku kepentingan, sehingga memastikan bahwa upaya yang dikeluarkan (termasuk masukan tenaga kerja, waktu, dan sumber daya keuangan) disederhanakan sambil memaksimalkan manfaat bagi masyarakat.

Kecukupan

Berdasarkan kerangka konseptual kecukupan yang dikemukakan oleh (Jones, 1991) yaitu sejauh mana efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program mampu memenuhi kebutuhan, nilai, dan harapan masyarakat. Dunn, (2003) menjelaskan Kecukupan dalam analisis kebijakan tidak hanya menilai ada atau tidaknya keluaran program, tetapi secara esensial mengukur sejauh mana hasil kebijakan benar-benar menjawab intensitas masalah sosial yang ada. Evaluasi pembangunan infrastruktur pasca pemekaran di Desa Ogolali menunjukkan capaian yang bersifat bertentangan. Dari sisi pemerintah desa dilaporkan bahwa sekitar 80% target pembangunan telah terealisasi, dengan capaian signifikan pada pembangunan irigasi yang berkontribusi nyata terhadap produktivitas pertanian dan berpotensi mengurangi kemiskinan struktural di kalangan petani, namun dari sisi masyarakat terdapat keluhan terkait janji perbaikan infrastruktur jalan yang belum terealisasi sehingga mengindikasikan adanya kesenjangan antara capaian teknis proyek dan harapan publik. Kebijakan yang efektif sering kali berfokus pada manfaat jangka pendek daripada strategi adaptasi jangka panjang, menunjukkan adanya kesenjangan dalam memenuhi harapan masyarakat yang lebih luas (Pradhan et al., 2017). Dalam konsep kecukupan tidak hanya menilai ada atau tidaknya keluaran program, tetapi mengukur sejauh mana hasil kebijakan benar-benar menjawab intensitas masalah sosial yang ada dengan kata lain, suatu program dapat memiliki keluaran yang tampak signifikan namun tetap tidak memadai jika tidak menyelesaikan masalah pokok yang dirasakan masyarakat. Dalam konteks Desa Ogolali, penerapan konsep Dunn mempertegas bahwa pemenuhan aspek-aspek dasar seperti irigasi menunjukkan tingkat kecukupan pada bidang pertanian, tetapi kegagalan memenuhi kebutuhan aksesibilitas transportasi (jalan) mengurangi kecukupan keseluruhan karena jalan merupakan prasyarat krusial untuk distribusi hasil produksi, akses layanan publik, dan mobilitas ekonomi. Faktor penyebab kesenjangan ini tampak meliputi keterbatasan pemahaman sebagian masyarakat terhadap manfaat proyek, keterbatasan partisipasi warga dalam perencanaan, serta kendala perencanaan dan pendanaan yang menunda realisasi beberapa komponen infrastruktur. Sesuai pendekatan evaluasi yang berfokus pada kecukupan menuntut perhatian bukan hanya pada proporsi target yang terealisasi tetapi juga pada sejauh mana hasil tersebut menyelesaikan kebutuhan nyata masyarakat. Oleh karena itu, meskipun progres pembangunan di Ogolali bersifat substansial dan menunjukkan arah positif, akan tetapi belum sepenuhnya tercapai.

Pemerataan

Dalam pandangan Dunn, (2003) menjelaskan bahwa Pemerataan dalam analisis kebijakan berfokus pada distribusi akibat dan usaha antar kelompok secara rasional, baik dari sisi legal maupun sosial. Evaluasi terhadap pelaksanaan program pasca pemekaran di Desa Ogolali menunjukkan bahwa upaya pemerataan telah dilaksanakan secara intensif oleh pemerintah desa, sehingga hampir seluruh kelompok masyarakat melaporkan menerima manfaat dari berbagai program pembangunan infrastruktur dan layanan publik, pemerintah desa melaporkan pelaksanaan program yang menyeluruh, sedangkan persepsi masyarakat umumnya menegaskan tidak adanya kelompok yang terpinggirkan meskipun beberapa informan menilai capaian belum sepenuhnya maksimal, khususnya pada aspek kualitas dan kelengkapan fasilitas. Analisis ini menegaskan bahwa distribusi sumber daya dan pelaksanaan program diarahkan pada inklusivitas misalnya alokasi program bantuan dan pembangunan fasilitas dasar disebarkan ke berbagai wilayah dan kelompok sosial sehingga kriteria

penerimaan kebijakan secara adil yang ditekankan oleh (Dunn, 2003). Tercermin dalam persepsi publik di Ogolali, meskipun ruang untuk peningkatan efektivitas dan kualitas pelaksanaan masih ada. Selain itu, temuan di Ogolali memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pemekaran desa dapat menjadi mekanisme untuk mempercepat dan memperluas akses terhadap infrastruktur dasar, sehingga mendorong pemerataan layanan publik di tingkat lokal. Peningkatan tingkat layanan publik dasar di daerah pedesaan sangat penting untuk mencapai pemerataan secara keseluruhan. Secara sintesis, meskipun upaya pemerataan di Desa Ogolali menunjukkan hasil positif dan mayoritas warga tidak merasa terpinggirkan yang berarti indikator pemerataan dalam arti distribusi manfaat telah terpenuhi pada tingkat dasar keberlanjutan, kualitas pelaksanaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat tetap diperlukan untuk memastikan bahwa pemerataan tersebut tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substantif dan berkelanjutan.

Responsivitas

Responsivitas mengukur sejauh mana respons tersebut menghasilkan tindakan yang secara substantif memenuhi kebutuhan, preferensi, dan nilai kelompok sasaran (Dunn, 2003). Responsivitas pemerintah desa yang dalam kerangka evaluasi kebijakan dilihat bukan hanya dari ketersediaan mekanisme partisipatif tetapi juga dari sejauh mana respons tersebut menghasilkan tindakan yang memenuhi kebutuhan, preferensi, dan nilai kelompok sasaran menjadi tolak ukur utama dalam menilai efektivitas pembangunan infrastruktur pasca pemekaran di Desa Ogolali. Analisis temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun aparat desa telah membangun mekanisme formal untuk menampung aspirasi (mis. musrenbang) dan mengklaim sikap cepat tanggap, implementasi praktik responsif masih menghadapi hambatan signifikan partisipasi warga relatif rendah dan banyak aspirasi (terutama terkait perbaikan jalan) belum diikuti oleh tindak lanjut yang terukur sehingga klaim responsivitas cenderung bersifat prosedural daripada substantif. Keterlibatan mereka seringkali kurang mendalam, dengan banyak yang hanya mencapai tahap mengetahui (Tung et al., 2022). Responsivitas harus memadukan evaluasi proses (apakah ada forum partisipatif), keluaran (apakah ada kebijakan/tindakan yang dihasilkan), dan hasil (apakah tindakan tersebut memenuhi preferensi kelompok sasaran). Dari perspektif ini, Desa Ogolali perlu memperkuat saluran partisipasi yang menjangkau warga yang tidak dapat hadir dalam forum formal, meningkatkan transparansi pelaporan kemajuan proyek, menetapkan indikator kinerja dan tenggat waktu untuk tindak lanjut, serta menginstitusikan mekanisme monitoring partisipatif sehingga respons pemerintah bergeser dari sekadar pencatatan aspirasi menjadi tindakan nyata yang meningkatkan kualitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Pemekaran Desa Ogolali menunjukkan dampak positif terhadap penyediaan infrastruktur dasar terlihat dari realisasi fasilitas pendidikan, kesehatan, irigasi, dan perluasan akses listrik namun capaian tersebut bersifat lebih kuat pada output proyek daripada outcome yang berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat. Khususnya kebutuhan kritis seperti perbaikan dan pengaspalan jalan desa belum terpenuhi sehingga menghambat distribusi hasil produksi dan mobilitas ekonomi. Secara praktis, pemekaran memperpendek jalur birokrasi dan membuka peluang alokasi sumber daya yang lebih terarah, serta mendorong partisipasi masyarakat yang berkontribusi pada efisiensi pelaksanaan. Dilain pihak kendala fiskal, kapasitas teknis lokal, komunikasi publik yang belum memadai, dan hambatan geografis menurunkan efektivitas, kecukupan, dan responsivitas implementasi. Dengan demikian, pemekaran memiliki potensi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemerataan layanan publik asalkan disertai peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan tata kelola dan transparansi pengelolaan dana, prioritas anggaran untuk infrastruktur kritis (khususnya jalan), serta mekanisme monitoring dan evaluasi partisipatif untuk memastikan tindak lanjut aspirasi masyarakat. Keterbatasan studi termasuk fokus pada satu kasus Desa Ogolali dan desain *cross-sectional* membatasi generalisasi.

Arah Penelitian Masa Depan

Berdasarkan temuan dan keterbatasan studi kasus Desa Ogolali, penelitian selanjutnya sebaiknya fokus pada upaya memperluas generalisasi, memperdalam pemahaman mekanisme, dan menguji intervensi kebijakan yang konkret. Studi lanjutan dianjurkan untuk mengeksplorasi:

1. Studi komparatif multi-lokasi lakukan penelitian komparatif antar beberapa desa hasil pemekaran (dari berbagai wilayah geografis dan administratif) untuk menguji konsistensi dampak terhadap pembangunan infrastruktur dan faktor-faktor moderating seperti kapasitas aparatur, alokasi anggaran, dan kondisi geografis.
2. Desain longitudinal gunakan panel data atau studi longitudinal untuk melacak perkembangan output dan outcome (mis. aksesibilitas, pendapatan rumah tangga, layanan publik) sebelum dan setelah pemekaran selama beberapa tahun, sehingga dapat menilai efek jangka panjang dan dinamika adaptasi lokal.

3. Pendekatan mixed-methods partisipatif gabungan survei kuantitatif rumah tangga dan analisis administratif dengan kajian kualitatif (wawancara mendalam, focus group, observasi partisipatif) untuk memahami mengapa beberapa inisiatif infrastruktur menghasilkan outcome nyata sementara yang lain tidak, serta untuk memperkuat mekanisme monitoring partisipatif.
4. Analisis ekonomi dan cost benefit teliti dampak ekonomi spesifik dari infrastruktur kunci (terutama perbaikan jalan dan irigasi) melalui analisis biaya-manfaat, efek pada produktivitas pertanian, akses pasar, dan pengurangan biaya transportasi.
5. Analisis spasial dan penggunaan data geospasial memanfaatkan GIS dan citra satelit untuk memetakan distribusi infrastruktur, hambatan geografis, serta hubungan spasial antara lokasi desa, jaringan jalan, dan indikator pembangunan ekonomi.
6. Kajian politik-ekonomi dan tata kelola teliti peran motif politik, proses pengambilan keputusan lokal, transparansi pengelolaan dana desa, dan mekanisme akuntabilitas dalam menentukan prioritas infrastruktur pasca-pemekaran.
7. Penekanan pada inklusivitas dan kelompok rentan kaji dampak pemekaran terhadap perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya untuk memastikan pemerataan manfaat dan desain kebijakan yang sensitif gender serta inklusif.
8. Uji coba intervensi kebijakan dan model monitoring rancang eksperimen kebijakan kecil (piloting) untuk model penguatan kapasitas aparatur desa, mekanisme partisipatif, atau skema pendanaan terprioritas (mis. ring-fenced funding untuk jalan). Evaluasi pilot tersebut dengan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas.
9. Studi respons terhadap perubahan iklim dan keberlanjutan infrastruktur teliti bagaimana desain dan pemeliharaan infrastruktur pasca-pemekaran mengakomodasi ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, termasuk opsi pendanaan untuk pemeliharaan jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Arsyad, D. H., & Sawir, M. (2022). *Bahan Ajar Etika Administrasi Publik*. Media Sains Indonesia.
- Ar-rasyid, R. H., Nabilah, F., Shevaulia, H. S., Aaliyah, S., Mulyawati, Y., Zahra, F. A., Fauziyyah, H., Putra, R. T., Sari, A. Y., Arbiansyah, M. N., Bakti, R., Aini, A. N., Febianti, Y. N., Kedokteran, F., Swadaya, U., Jati, G., Hukum, F., Swadaya, U., Jati, G., ... Jati, G. (2025). Penambahan Lapangan Bola Voli Untuk Mendukung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa*, 8(April 2025), 7–14.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design, Qualitative, Quantitative and Mix Method Approaches (Five). In *Sage* (Issue 2, pp. 2–5). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT%0Ahttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0011:pt:NOT>
- Dunn, W. N. (2012). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. In *Gadjah Mada Universitas Press* (pp. 1–710).
- Fachri, Z., Rispawati, R., Basariah, B., & Sumardi, L. (2025). The Impact of Village Expansion on the Socioeconomic Life of the Community in Rempek Darussalam Village. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 16(1), 183. <https://doi.org/10.58836/jpma.v16i1.25135>
- Faoziyah, U., & Salim, W. (2020). Seeking prosperity through village proliferation: An evidence of the implementation of village funds (Dana Desa) in Indonesia. *Journal of Regional and City Planning*, 31(2), 97–121. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2020.31.2.1>
- Haile, A. K. (2020). Nigeria's Contemporary Security Challenges: Herders – Farmers Conflict and Banditry. *Research on Humanities and Social Sciences*, September. <https://doi.org/10.7176/rhss/10-17-04>
- Hasyim, A., Hadi Dharmawan, A., & Juan, B. (2010). Analisis Konflik Perebutan Wilayah di Provinsi Maluku Utara: Studi Kasus Konflik Perebutan Wilayah Antara Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara tentang Enam Desa. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(1). <https://doi.org/10.22500/sodality.v4i1.5854>
- Jones, C. O. (1991). *Pengantar Kebijakan Publik: (Public Policy)*. K-Media. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=292971>
- Nafisah, M., & Kholifah R, E. (2023). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember). *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(3), 1–15. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i3.123>
- Nuraini, A., & Sawir, M. (2022). *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik*. Media Sains Indonesia.
- Pradhan, N. S., Su, Y., Fu, Y., Zhang, L., & Yang, Y. (2017). Analyzing the Effectiveness of Policy Implementation at the Local Level: A Case Study of Management of the 2009–2010 Drought in Yunnan Province, China. *International Journal of Disaster Risk Science*, 8(1), 64–77. <https://doi.org/10.1007/s13753-017-0118-9>

- Sawir, M., Sos, S., AP, M., Hanafi, M., Herawati, K. M., Ningsih, Y., ... & Ap, S. (2022). *Ilmu Administrasi Disegala Bidang*. Media Sains Indonesia.
- Sapara, L. A., & Eprilianto, D. F. (2024). Kajian Pemekaran Desa dalam Upaya Pemerataan Pembangunan (Studi Kasus di Desa Persiapan Ngandel Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 36, 727–738. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n3.p727-738>
- Soesilo.R. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Komentar Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. *Politeia Bogor*, 1(1).
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Sutrisno, Tri Wahyuni, & Mardiani. (2024). Pengembangan Infrastruktur dalam Usaha Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Transmigran Desa Parit Keladi 1, Pontianak: Studi Fenomenologi. *Abdimas Awang Long*, 7(2), 163–173. <https://doi.org/10.56301/awal.v7i2.1210>
- Tirta Yoga, Eri Yusnita, Cakti Indragunawan *et al.* (2024). *Aspirasi: Jurnal Publikasi Pengabdian Dan Kegiatan Masyarakat*. 2(2).
- Tung, D. T., Diem, L. T. T., Luan, D. X., & Linh, N. H. K. (2022). The National Target Program for New Rural Development in Vietnam: An Understanding of People's Participation and Its Determinants. *Sustainability (Switzerland)*, 14(19). <https://doi.org/10.3390/su141912140>
- Walker, S., Fox, A., Altunkaya, J., Colbourn, T., Drummond, M., Griffin, S., Gutacker, N., Revill, P., & Sculpher, M. (2022). Program Evaluation of Population- and System-Level Policies: Evidence for Decision Making. *Medical Decision Making*, 42(1), 17–27. <https://doi.org/10.1177/0272989X211016427>
- Windani, J., & Sukmawati, A. M. (2023). Dampak Ekonomi Pembangunan Jalan Pertanian di Desa Dangiang, Kabupaten Garut. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 18(2), 10–20. <https://doi.org/10.29313/jpww.v18i2.2697>